

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi : perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Posisi Bappeda sebagai perangkat daerah, sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah "Tata Kelola pemerintahan yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel". Dari isu tata kelola pemerintahan, Bappeda terkait dengan sub isu: Perencanaan pembangunan partisipatif dan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi. Permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut;

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola Pemerintah yang akuntabel dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Belum optimalnya persentase realisasi capaian RPJMD	Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah
2	Transparansi, monitoring, evaluasi dan pengawasan berbasis TI dengan data yang andal dan terbarukan.	Belum optimalnya persentase kajian yg ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan daerah	Belum optimalnya rekomendasi/kajian/peencanaan yang ditindaklanjuti OPD teknis

		Belum optimalnya persentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD	Masih minimnya staf yang meningkat kapasitas atau ketrampilan teknisnya sebagai perencana
		Belum optimalnya persentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan RKPD dengan APBD	Belum optimalnya ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penyampaian laporan
		Belum optimalnya persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	Masih rendahnya persentase kegiatan yang terselesaikan
		Belum optimalnya persentase realisasi capaian kinerja RKPD	Belum optimalnya persentase program dalam Restra OPD yang mencapai target RPJMD
		Belum optimalnya persentase hasil kajian perencanaan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan	Belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang-bidang
		Belum optimalnya persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan masukan perumusan kebijakan daerah	Belum optimalnya usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang-bidang yang tertampung dalam Renja
		Belum optimalnya persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Masih rendahnya hasil kajian dari bidang-bidang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan masukan perumusan kebijakan daerah
			Masih rendahnya pertumbuhan inovasi oleh OPD dan masyarakat
			Belum optimalnya pertumbuhan mitra penerima publikasi produk kelitbangan

			Masih rendahnya persentase mitra yang aktif bekerjasama menghasilkan kajian
			Belum optimalnya produk inovasi yang dipamerkan
			Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan ijin penelitian belum maksimal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya Bappeda mendukung Visi Kabupaten Pati dari unsur Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022 memiliki misi :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian misi "meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis

dan mengutamakan pelayanan publik", terutama pada sub isu Perencanaan pembangunan partisipatif dan pengukuran kinerja.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Bappeda sebagaimana dipaparkan pada Tabel III.1. di atas, dan dikaitkan dengan telaah visi dan misi Bupati terpilih selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Kab. Pati Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik	Perencanaan daerah belum sepenuhnya terukur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Kompetensi sumber daya perencana masih kurang 2. manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi	Memiliki ASN dengan jabatan fungsional perencana dan peneliti Tersedia ragam Diklat perencana, peneliti, dan analisis kebijakan yang diselenggarakan oleh K/L/Provinsi atau Perguruan Tinggi
		Kajian/penelitian dan produk inovasi yang dihasilkan belum selaras dengan permasalahan di Kab. Pati	Kompetensi sumber daya peneliti yang kurang optimal dan belum adanya analisis kebijakan Jejaring penelitian dengan OPD, dunia usaha, masyarakat, maupun	Tersedia skema penelitian di PT yang mengharuskan bermitra dengan daerah

			perguruan tinggi belum dikembangkan secara optimal	
--	--	--	--	--

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, tantangan isu strategis yang dihadapi Bappeda untuk mewujudkan Pati yang Sejahtera dan Pelayanan Publik yang prima adalah

1. Dibidang perencanaan, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah penguatan peran Bappeda sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Keberhasilan pembangunan dan ketepatan manfaat hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh akurasi dan data terbaru. Dengan demikian Bappeda bertanggungjawab untuk menarasikan data dan mempublikasikan kepada Perangkat daerah sebagai rujukan perencanaan pembangunan
2. Dibidang penelitian dan pengembangan, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah implementasi kebijakan-kebijakan daerah berbasis riset, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.3. Telaahan renstra Kementerian

1. Telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas.

Pada saat penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 belum dipublikasikan, sehingga telaah dilakukan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan visi pembangunan nasional, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yaitu:

- a. Sasaran Makro (Pembangunan Manusia dan Masyarakat; Ekonomi Makro);
- b. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Kependudukan dan Keluarga Berencana; Pendidikan; Kesehatan; Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Anak; Pembangunan Masyarakat);
- c. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan (Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; Maritim dan Kelautan; Pariwisata dan Industri Manufaktur; Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas);
- d. Sasaran Dimensi Pemerataan (Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi; Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu);
- e. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah (Pemerataan Pembangunan Antarwilayah);
- f. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Politik dan Demokrasi; Penegakan Hukum; Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi; Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah; Pertahanan dan Keamanan).

Dalam Buku III RPJMN Tahun 2015-2019, khususnya pada kebijakan arah pengembangan wilayah Pulau Jawa dan Bali, Kabupaten Pati menjadi salah satu prioritas pengembangan Pusat Kegiatan Lokal periode 2015-2019. Salah satu bentuk kegiatan strategis nasional yang diprioritaskan di Kabupaten Pati dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur adalah pembangunan bendung karet di Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi bencana banjir maupun intrusi air laut.

Sesuai Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian PPN/Bappenas yang tercantum di dalam RPJMN Tahun 2015-2019, terdapat empat program yang masing-masing memiliki sasaran dengan indikator dan target lima tahun ke depan disertai alokasi anggarannya. Berikut keempat program dan sarannya:

a. Program perencanaan pembangunan nasional

Sasaran:

- 1) Terdapatnya pedoman untuk melaksanakan pembangunan nasional jangka menengah dan jangka pendek
- 2) Terjaganya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

Sasaran:

- 1) Tersedianya dukungan terhadap proses penyusunan rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan akuntabel
- 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas

c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sasaran:

- 1) Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas kerja Kementerian PPN/Bappenas

d. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas

Sasaran:

- 1) Terjaganya akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas melalui pengawasan internal

Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian indikator dalam Matriks RPJMN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda

Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yaitu: tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam pembangunan kabupaten dan terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang konsisten dan sinergis antar sektor dan antar wilayah. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Pati secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

Capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pati nantinya akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019.

2. Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Bappeda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan dan statistik; pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik; pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan dan kependudukan, infrastruktur dan pembangunan wilayah serta pelaksanaan statistik lingkup provinsi dan kabupaten/kota; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan statistik; pelaksanaan kesekretariatan Bappeda; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas selama kurun waktu tahun 2013-2018, Bappeda Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Di dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, tertuang visi Bappeda Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun mendatang, yaitu:

"Profesional, Partisipatif, dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan."

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasionalnya, yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.
- b. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien.
- c. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi.
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan.
- e. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Untuk mewujudkan visi dan misi jangka menengah di atas, Bappeda Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan dan sasaran yang dapat dijabarkan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM

Tujuan: Menciptakan SDM yang semakin berkualitas

Sasaran: Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi.

- b. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien

Tujuan : Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik

Sasaran:

1) Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan;

2) Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran.

- c. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi

Tujuan: Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Sasaran:

1) Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

2) Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (*realtime*) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

d. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan

Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Sasaran:

- 1) Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota;
- 2) Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

e. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Tujuan: Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran:

- 1) Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
- 2) Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yaitu terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras, terukur, konsisten, partisipatif serta dihasilkannya kebijakan perencanaan pembangunan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan.

Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perencana dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Pati akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pati akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Dalam implementasi RTRW tersebut saat ini belum tersedia peraturan pelaksanaan/operasional dalam bentuk rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Untuk itu dalam lima tahun mendatang, tantangan dalam perencanaan tata ruang adalah mewujudkan Perda RDTR sebagai acuan operasional pemanfaatan ruang kota, termasuk di dalamnya untuk acuan perizinan pemanfaatan ruang.

Sejalan dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan kejadian bencana alam, terdapat perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu sudah dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hasil peninjauan kembali RTRW Kabupaten Pati merekomendasikan perlunya dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Pati.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pati adalah terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 meliputi : a. penetapan hirarki sistem perkotaan dan kawasan layanannya, dalam rangka menciptakan hubungan Kota-Desa; dan b. pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal.

Rencana sistem perwilayahan pembangunan diwujudkan melalui : a. rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP); dan b. rencana sistem pusat pelayanan. Pasal 12 (1) Rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai

dengan karakter kawasan. (2) Wilayah Daerah direncanakan menjadi 6 (enam) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), meliputi :

- a. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Pati meliputi : Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus;
- b. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Trangkil meliputi : Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margoyoso;
- c. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Tayu meliputi : Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal , dan Kecamatan Dukuhseti;
- d. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Juwana meliputi : Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Batangan;
- e. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Jakenan meliputi : Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi; dan
- f. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Kayen meliputi : Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.

Dalam kaitannya dengan arahan sistem pusat pelayanan, RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 merencanakan sistem pusat pelayanan meliputi :

- a. Pengembangan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Per kotaan Tayu;
- b. pengembangan PPK yang akan dipromosikan menjadi PKLp meliputi Ibukota Kecamatan Kayen; dan
- c. Pengembangan PPK meliputi Ibukota Kecamatan Jakenan, Ibukota Kecamatan Sukolilo, Ibukota Kecamatan Winong, Ibukota Kecamatan Pucakwangi, Ibukota Kecamatan Trangkil, Ibukota Kecamatan Wedarijaksa, Ibukota Kecamatan Tambakromo, Ibukota Kecamatan Batangan, Ibukota Kecamatan Jaken, Ibukota Kecamatan Gabus, Ibukota Kecamatan Gembong, Ibukota Kecamatan Tlogowungu, Ibukota

Kecamatan Margoyoso, Ibukota Kecamatan Gunungwungkal , Ibukota Kecamatan Cluwak, dan Ibukota Kecamatan Dukuhseti.

Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi Bappeda adalah mengkoordinasikan perencanaan sektor dan kewilayahan sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pati untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat mendukung perwujudan bumi Pati yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.

Kajian KLHS berimplikasi pada peran Bappeda untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektor berdimensi kewilayahan untuk mengurangi resiko kebencanaan dan memperkuat status mutu lingkungan.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Bappeda Kabupaten Pati melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Bappeda Kabupaten Pati pada tahun 2017 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Bappeda Kabupaten Pati dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Bappeda Kabupaten Pati yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022; (ii) Sesuai tugas dan fungsi Bappeda ; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

1. Kekuatan Internal

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan tugas fungsi Bappeda;
- b. Ketersediaan ASN fungsional perencana dan peneliti
- c. Struktur organisasi tipe A sehingga memenuhi kebutuhan struktur penugasan Bappeda
- d. Bappeda produktif menghasilkan dokumen-dokumen kajian
- e. Memiliki roadmap sistem inovasi daerah.

2. Kelemahan Internal

- a. Masih terbatasnya kualitas SDM di bidang perencanaan dan analisis kebijakan.
- b. Belum dimanfaatkannya dokumen kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan.
- c. Sistem data dan informasi yang akurat dan terintegrasi belum efektif

3. Tantangan/ancaman eksternal

- a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Masih adanya ketidaktaatan PD dalam memedomani dokumen kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan.
- c. Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif , adaptif, dan cepat.

4. Peluang dari lingkungan eksternal

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
- b. Pelaksanaan anugerah pangripta untuk daerah dengan perencanaan terbaik.
- c. Adanya tenaga ahli pendamping dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Tabel 3.3
Isu-isu dari Tugas Fungsi Bappeda Kabupaten Pati

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu -isu
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan terintegrasi yang akurat dan terbarukan; 2. Pengembangan sistem inovasi daerah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan inovasi pelayanan publik; 3. Pengembangan kebijakan teknis perencanaan daerah yang sinergis guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah, pencapaian kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 	<p>Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran Bappeda sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, didukung akurasi dan data terbaru. 2. Implementasi kebijakan-kebijakan daerah berbasis riset, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sasaran jangka menengah Kementerian PPN/ Bappenas dan Bappeda	<p>Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi Bappeda yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, b. Peningkatan kapasitas 	<p>Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik antar sektor maupun antar wilayah, b. Peningkatan kualitas SDM;

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu -isu
Provinsi Jawa Tengah	kelembagaan Bappeda	
Implikasi RTRW	Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi Bappeda adalah mengkoordinasikan perencanaan sektor dan kewilayahan sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda : Penguatan peran Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah dalam pembangunan pengembangan kewilayahan
Implikasi KLHS	Kajian KLHS berimplikasi pada peran Bappeda untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektor berdimensi kewilayahan untuk mengurangi risiko kebencanaan dan memperkuat status mutu lingkungan.	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda : Penguatan peran Bappeda dalam pengendalian perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.

Sumber: Analisis, 2017

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Bappeda Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi dan misi kepala daerah, telaahan rencana strategis kementerian, telaahan rencana strategis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut :

1. Keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Isu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah khususnya di bidang perencanaan dan kelitbangan;
3. Pemenuhan kelengkapan data sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan;
4. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik antar sektor maupun antar wilayah;
5. Peningkatan kualitas dan Tindak lanjut dokumen hasil kajian dan inovasi menjadi kebijakan daerah.